



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

79

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
 2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
 3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Kapitalaung adalah pejabat pemerintah Kampung, yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 5. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kapitalaung setelah dibahas dan disepakati bersama majelis tua-tua Kampung.
 6. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Kampung.
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
 8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. r h
-

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam rangka penyusunan APBKampung; dan
- b. bagian dari hasil Pajak dan Retribusi dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas Keuangan Kampung dalam rangka percepatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi dapat dipergunakan untuk membiayai:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

BAB II

ALOKASI DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 4

Alokasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. bagian dari hasil Pajak sebesar Rp1.593.686.000,00(satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah); dan
- b. bagian dari Retribusi sebesar Rp1.545.634.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah). 11 4,

BAB III PEMBAGIAN

Pasal 5

Pembagian dari hasil Pajak dan Retribusi setiap Kampung di bagi dengan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Kampung; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari setiap Kampung.

Pasal 6

Rincian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Mekanisme penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Kampung.
- (2) Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi disalurkan paling cepat Bulan November tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan Kampung.
- (3) Penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang dibidang keuangan setelah menerima:
 - a. surat permohonan pencairan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dari Kapitalaung mengetahui Camat; dan
 - b. dokumen anggaran pendapatan dan belanja Kampung beserta lampiran rencana anggaran biaya penggunaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi.

- (4) Penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi menyesuaikan dengan realisasi pendapatan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi.
- (5) Penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicairkan setelah mendapatkan persetujuan dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan.
- (6) Pemerintah Kampung mencairkan dana kampung bagian dari hasil Pajak dan Retribusi wajib melampirkan rekomendasi dari kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (7) Slip penarikan dana kampung dari bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib ditandatangani oleh Kapitalaung, sekretaris Kampung dan kepala urusan keuangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 76

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 3 Maret 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


MICHAEL THUNGARI

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal 3 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


MELANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025 NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	BAGI HASIL		TOTAL DANA KAMPUNG PER KAMPUNG
			PAJAK	RETRIBUSI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
1	Tabukan Utara	Kalasuge	17,514,000	16,986,000	34,500,000
2	Tabukan Utara	Bahu	26,495,000	25,696,000	52,191,000
3	Tabukan Utara	Mala	32,054,000	31,088,000	63,142,000
4	Tabukan Utara	Kalekube	15,274,000	14,813,000	30,087,000
5	Tabukan Utara	Naha	7,210,000	6,992,000	14,202,000
6	Tabukan Utara	Beha	11,593,000	11,244,000	22,837,000
7	Tabukan Utara	Utaurano	9,961,000	9,661,000	19,622,000
8	Tabukan Utara	Lenganeng	9,961,000	9,661,000	19,622,000
9	Tabukan Utara	Tarolang	16,792,000	16,286,000	33,078,000
10	Tabukan Utara	Tola	11,687,000	11,334,000	23,021,000
11	Tabukan Utara	Kalurae	13,076,000	12,682,000	25,758,000
12	Tabukan Utara	Bengketang	10,558,000	10,240,000	20,798,000
13	Tabukan Utara	Petta	13,036,000	12,643,000	25,679,000
14	Tabukan Utara	Bowongkulu	11,271,000	10,931,000	22,202,000
15	Tabukan Utara	Pusunge	13,006,000	12,614,000	25,620,000
16	Tabukan Utara	Moade	13,818,000	13,402,000	27,220,000
17	Tabukan Utara	Raku	20,346,000	19,732,000	40,078,000
18	Tabukan Utara	Petta Timur	15,966,000	15,484,000	31,450,000
19	Tabukan Utara	Petta Barat	13,112,000	12,717,000	25,829,000
20	Tabukan Utara	Petta Selatan	8,074,000	7,830,000	15,904,000
21	Tabukan Utara	Likuang	9,703,000	9,411,000	19,114,000
22	Tabukan Utara	Kalekube I	12,432,000	12,057,000	24,489,000
23	Tabukan Utara	Bowongkulu I	7,043,000	6,831,000	13,874,000
24	Tabukan Utara	Naha I	8,959,000	8,689,000	17,648,000
25	Nusa Tabukan	Nanedakele	10,801,000	10,476,000	21,277,000
26	Nusa Tabukan	Nusa	14,299,000	13,868,000	28,167,000
27	Nusa Tabukan	Bukide	10,729,000	10,406,000	21,135,000

n

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
28	Nusa Tabukan	Bukide Timur	10,509,000	10,192,000	20,701,000
29	Nusa Tabukan	Nanusa	9,020,000	8,749,000	17,769,000
30	Manganitu Selatan	Kaluwatu	9,177,000	8,901,000	18,078,000
31	Manganitu Selatan	Laine	13,606,000	13,196,000	26,802,000
32	Manganitu Selatan	Lapango	17,474,000	16,947,000	34,421,000
33	Manganitu Selatan	Sowaeng	8,943,000	8,674,000	17,617,000
34	Manganitu Selatan	Ngalipaeng I	10,603,000	10,283,000	20,886,000
35	Manganitu Selatan	Ngalipaeng II	6,595,000	6,396,000	12,991,000
36	Manganitu Selatan	Batunderang	13,917,000	13,497,000	27,414,000
37	Manganitu Selatan	Bebalang	9,129,000	8,854,000	17,983,000
38	Manganitu Selatan	Mawira	8,942,000	8,673,000	17,615,000
39	Manganitu Selatan	Pindang	9,830,000	9,533,000	19,363,000
40	Manganitu Selatan	Lapepahe	10,704,000	10,382,000	21,086,000
41	Manganitu Selatan	Lehimi Tariang	9,084,000	8,810,000	17,894,000
42	Manganitu Selatan	Lapango I	9,827,000	9,531,000	19,358,000
43	Tatoareng	Kalama	12,108,000	11,743,000	23,851,000
44	Tatoareng	Kahakitang	12,860,000	12,472,000	25,332,000
45	Tatoareng	Mahengetang	7,925,000	7,686,000	15,611,000
46	Tatoareng	Para	6,595,000	6,396,000	12,991,000
47	Tatoareng	Dalako Bembanehe	6,595,000	6,396,000	12,991,000
48	Tatoareng	Taleko Batusaiki	6,595,000	6,396,000	12,991,000
49	Tatoareng	Para I	11,101,000	10,766,000	21,867,000
50	Tamako	Nagha I	22,593,000	21,911,000	44,504,000
51	Tamako	Nagha II	6,673,000	6,472,000	13,145,000
52	Tamako	Pokol	10,077,000	9,773,000	19,850,000
53	Tamako	Balane	11,604,000	11,254,000	22,858,000
54	Tamako	Binala	14,425,000	13,990,000	28,415,000
55	Tamako	Ulung Peliang	6,595,000	6,396,000	12,991,000
56	Tamako	Menggawa	10,795,000	10,470,000	21,265,000
57	Tamako	Kalinda	6,595,000	6,396,000	12,991,000
58	Tamako	B e b u	12,618,000	12,237,000	24,855,000
59	Tamako	Makalekuhe	11,373,000	11,030,000	22,403,000
60	Tamako	Pananaru	6,595,000	6,396,000	12,991,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
61	Tamako	D a g h o	11,206,000	10,868,000	22,074,000
62	Tamako	Mahumu	10,420,000	10,106,000	20,526,000
63	Tamako	Lelipang	11,566,000	11,217,000	22,783,000
64	Tamako	Menggawa II	6,595,000	6,396,000	12,991,000
65	Tamako	Kalama Darat	8,946,000	8,676,000	17,622,000
66	Tamako	Kalinda I	9,752,000	9,458,000	19,210,000
67	Tamako	Mahumu I	9,110,000	8,835,000	17,945,000
68	Tamako	Mahumu II	9,016,000	8,744,000	17,760,000
69	Tamako	Hesang	7,447,000	7,222,000	14,669,000
70	Manganitu	Tawoali	10,659,000	10,337,000	20,996,000
71	Manganitu	Barangka	10,352,000	10,040,000	20,392,000
72	Manganitu	Nahepese	12,448,000	12,073,000	24,521,000
73	Manganitu	Manumpitaeng	8,840,000	8,573,000	17,413,000
74	Manganitu	Taloarane	12,341,000	11,969,000	24,310,000
75	Manganitu	Mala	12,746,000	12,362,000	25,108,000
76	Manganitu	Karatung I	13,200,000	12,802,000	26,002,000
77	Manganitu	Karatung II	10,341,000	10,029,000	20,370,000
78	Manganitu	Kauhis	17,238,000	16,718,000	33,956,000
79	Manganitu	Sesiwung	13,123,000	12,728,000	25,851,000
80	Manganitu	Lebo	9,957,000	9,657,000	19,614,000
81	Manganitu	Barangkalang	12,609,000	12,229,000	24,838,000
82	Manganitu	Belengang	11,277,000	10,937,000	22,214,000
83	Manganitu	Bakalaeng	10,669,000	10,348,000	21,017,000
84	Manganitu	Hiung	13,680,000	13,267,000	26,947,000
85	Manganitu	Pinebentengang	11,752,000	11,398,000	23,150,000
86	Manganitu	Taloarane I	10,291,000	9,980,000	20,271,000
87	Manganitu	Bengka	10,352,000	10,040,000	20,392,000
88	Tabukan Tengah	Bowongkali	14,689,000	14,246,000	28,935,000
89	Tabukan Tengah	Kulur I	10,609,000	10,289,000	20,898,000
90	Tabukan Tengah	Kulur II	14,380,000	13,947,000	28,327,000
91	Tabukan Tengah	Bira	17,861,000	17,322,000	35,183,000
92	Tabukan Tengah	Kuma	11,142,000	10,807,000	21,949,000
93	Tabukan Tengah	Bungalawang	11,724,000	11,370,000	23,094,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
94	Tabukan Tengah	Miulu	12,583,000	12,203,000	24,786,000
95	Tabukan Tengah	Gunung	9,969,000	9,669,000	19,638,000
96	Tabukan Tengah	Talengen	16,432,000	15,936,000	32,368,000
97	Tabukan Tengah	Biru	10,229,000	9,921,000	20,150,000
98	Tabukan Tengah	Tariang Baru	15,165,000	14,708,000	29,873,000
99	Tabukan Tengah	Sensong	6,595,000	6,396,000	12,991,000
100	Tabukan Tengah	Rendingan	11,149,000	10,813,000	21,962,000
101	Tabukan Tengah	Palahanaeng	8,000,000	7,759,000	15,759,000
102	Tabukan Tengah	Timbelang	13,483,000	13,076,000	26,559,000
103	Tabukan Tengah	Pelelengen	13,323,000	12,922,000	26,245,000
104	Tabukan Tengah	Malueng	9,983,000	9,682,000	19,665,000
105	Tabukan Tengah	Kuma I	14,598,000	14,157,000	28,755,000
106	Tabukan Selatan	Simueng	9,463,000	9,178,000	18,641,000
107	Tabukan Selatan	Bentung	9,080,000	8,806,000	17,886,000
108	Tabukan Selatan	Lesabe	13,315,000	12,914,000	26,229,000
109	Tabukan Selatan	Malamenggu	10,607,000	10,287,000	20,894,000
110	Tabukan Selatan	Palareng	9,156,000	8,880,000	18,036,000
111	Tabukan Selatan	Binebas	9,837,000	9,541,000	19,378,000
112	Tabukan Selatan	Mandoi	6,595,000	6,396,000	12,991,000
113	Tabukan Selatan	Batuwingkung	7,925,000	7,686,000	15,611,000
114	Tabukan Selatan	Birahi	8,916,000	8,647,000	17,563,000
115	Tabukan Selatan	Laotongan	8,770,000	8,506,000	17,276,000
116	Tabukan Selatan	Bukide	8,937,000	8,667,000	17,604,000
117	Tabukan Selatan	Kalagheng	7,981,000	7,740,000	15,721,000
118	Tabukan Selatan	Lesabe I	10,121,000	9,816,000	19,937,000
119	Tabukan Selatan	Bulo	7,522,000	7,295,000	14,817,000
120	Kendahe	Kendahe I	8,719,000	8,456,000	17,175,000
121	Kendahe	Kendahe II	10,002,000	9,700,000	19,702,000
122	Kendahe	Talawid	10,341,000	10,029,000	20,370,000
123	Kendahe	Tariang Lama	8,250,000	8,001,000	16,251,000
124	Kendahe	Pempalraeng	11,534,000	11,187,000	22,721,000
125	Kendahe	Mohong Sawang	11,633,000	11,282,000	22,915,000
126	Kendahe	Lipang	6,595,000	6,396,000	12,991,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
127	Kendahe	Kawaluso	6,989,000	6,778,000	13,767,000
128	Tabukan Selatan Tengah	Hangke	8,943,000	8,674,000	17,617,000
129	Tabukan Selatan Tengah	Salurang	7,964,000	7,724,000	15,688,000
130	Tabukan Selatan Tengah	Tambung	6,595,000	6,396,000	12,991,000
131	Tabukan Selatan Tengah	Beeng	12,227,000	11,858,000	24,085,000
132	Tabukan Selatan Tengah	Lehupu	10,253,000	9,944,000	20,197,000
133	Tabukan Selatan Tengah	Bowone	8,166,000	7,920,000	16,086,000
134	Tabukan Selatan Tengah	Beeng Laut	7,956,000	7,716,000	15,672,000
135	Tabukan Selatan Tengah	Tenda	6,595,000	6,396,000	12,991,000
136	Tabukan Selatan Tengah	Aha Patung	6,595,000	6,396,000	12,991,000
137	Tabukan Selatan Tenggara	Pintareng	15,627,000	15,156,000	30,783,000
138	Tabukan Selatan Tenggara	Basauh	14,190,000	13,762,000	27,952,000
139	Tabukan Selatan Tenggara	Tumalede	8,523,000	8,266,000	16,789,000
140	Tabukan Selatan Tenggara	Sampakang	11,571,000	11,223,000	22,794,000
141	Tabukan Selatan Tenggara	Dalokaweng	10,538,000	10,220,000	20,758,000
142	Tabukan Selatan Tenggara	Malisade	9,056,000	8,783,000	17,839,000
143	Kepulauan Marore	Marore	8,636,000	8,375,000	17,011,000
144	Kepulauan Marore	Kawio	7,669,000	7,437,000	15,106,000
145	Kepulauan Marore	Matutuang	6,595,000	6,396,000	12,991,000
	TOTAL		1,593,686,000	1,545,634,000	3,139,320,000

m

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI